

**PENERAPAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA  
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
DI DESA/NEGERI BATUMERAH KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU**

Moh. Wildan Sanmas

NPP. 30.1404

*Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku*

*Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: mohammadwildhan2301@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Arwanto Harimas Ginting., S.STP., M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on strengthening democratic values in the management of village funds in the field of implementing village development in Batumerah Village/country, Sirimau District, Ambon City, Maluku Province. **Purpose:** ". This research is intended to find out how the village fund management system is in Batumerah Village/State, Sirimau District, Ambon City, Maluku Province and the inhibiting and supporting factors in managing village funds and what supports it in the field of community development. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method and analyzes democratic values according to Suacana Theory. Data collection techniques were carried out by observing during the research, in-depth interviews (11 informants), and documentation. **Results/Findings:** The findings obtained by the authors in this study are Strengthening Democratic Values in the Management of Village Funds in the Field of Implementation of Village Development in Batumerah Village, Sirimau District, Ambon City, Maluku Province, which is not optimal, the inhibiting factors are human resources, age, and covid-19 . **Conclusion:** The application of democratic values according to Suacana Theory in managing village funds in the field of implementing village development can work well because of respect for individual rights, political ethics, cooperation, rotation of power, equality, tolerance, transparency and accountability and participation the community has a positive impact on managing village funds in the field of implementing village development..

**Keywords:** Democratic Values; Village Funds; Village apparatus; Implementation of Village Development

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada penguatan nilai-nilai demokrasi dalam pengelolaan dana desa bidang pelaksanaan pembangunan desa di Desa/negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku. **Tujuan:** ”. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana desa di Desa/Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku dan faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana desa serta apa yang menunjang dalam bidang pembinaan kemasyarakatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis nilai-nilai demokrasi menurut Teori Suacana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi selama penelitian berlangsung, wawancara mendalam (11 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pengelolaan Dana Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku belum optimal, yang menjadi faktor penghambat adalah SDM, usia, dan covid-19. **Kesimpulan:** Penerapan nilai-nilai demokrasi menurut Teori Suacana dalam pengelolaan dana desa bidang pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik karena adanya penghargaan terhadap hak-hak individu, etika politik, kerja sama, adanya rotasi kekuasaan, kesetaraan, toleransi, transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat memberikan dampak positif dalam pengelolaan dana desa bidang pelaksanaan pembangunan desa. **Kata kunci:** Nilai-Nilai Demokrasi; Dana Desa; Perangkat Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Penguatan demokrasi di desa merupakan substansi penting dari Undang-Undang Desa yang memberikan harapan akan masa depan desa yang lebih baik. Demokrasi dalam Undang-Undang Desa diciptakan dalam akomodasi asas-asas pemerintahan yang baik, seperti asas keterbukaan, asas partisipasi, dan asas akuntabilitas pemerintahan Desa yang menjadi salah satu tolak ukur demokratisasi di tingkat desa (Maksum, Puspitosari, and Prastiwi 2020).

Dari sudut pandang kepentingan masyarakat desa, rekognisi dan subsidiaritas memberikan kesempatan bagi Desa untuk mencapai kehendak bersama dalam semangat desa membangun. Desa muncul sebagai subyek yang memiliki perencanaan dan menyusun prioritas pembangunannya sendiri, terlepas dari instruksi atau dikte pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Sementara di sisi lain menurut (Amanulloh, 2015) hanya dengan rekognisi dan subsidiaritas, watak feodal dan elitism penyelenggara Pemerintahan Desa berkesempatan untuk muncul kembali.

Tingkat literasi suatu daerah merupakan wujud dari keberhasilan pendidikan yang diselenggarakan. Literasi merupakan upaya pembangunan manusia. Membangun manusia berarti membangun karakter dari suatu bangsa. Kemajuan dan keberhasilan setiap aspek kehidupan terlahir dari bangsa yang terpelajar dan terdidik, sehingga terus mengalami perkembangan dan perubahan ke arah yang lebih baik (Tiara, Amir, and Riski 2016).

Adapun beberapa Lembaga-lembaga yang ikut serta dalam praktik demokrasi di desa ialah lembaga desa yang bersifat formal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan Karang Taruna, serta beberapa lembaga desa yang bersifat informal seperti paguyuban warga desa, dan organisasi masyarakat keagamaan. Perbedaan sifat kelembagaan ini akan menentukan seberapa jauh lembaga tersebut dapat ikut serta dan berpengaruh pada pelaksanaan praktik demokrasi yang dijalankan. Hal ini dikarenakan sejauh mana pencapaian tujuan dari masing-masing lembaga formal dan informal dalam praktik demokrasi akan menunjukkan efektivitas dari kedua kelembagaan tersebut (Nugroho, 2012).

Masyarakat akan menjadi variabel yang menentukan bagi pengembangan kapasitas desa. Begitu juga sebaliknya, kapasitas desa yang baik akan memainkan perannya di dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi di desa. Kapasitas desa dalam hal ini berkaitan dengan faktor, organisasi, konteks institusional maupun dimensi-dimensinya yang berkaitan dengan aspek pemerintahan desa dan civil society (masyarakat desa). Kapasitas diartikan sebagai kemampuan desa dalam menjalankan fungsi dan perannya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Peran-peran yang dimaksud adalah dalam perencanaan pemerintahan, kompetensi secara administratif, SDM, kepemimpinan, anggaran, serta perannya dalam penguatan masyarakat desa dan lainnya secara memadai (Cahyono, ddk 2020).

Tujuan dari dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan hal tersebut capaian dari penyaluran dana desa yang berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara memiliki dua prioritas utama yaitu pemberdayaan dan pembangunan, dan tidak berarti saja pembangunan fisik saja yang diprioritaskan tapi juga pemberdayaan masyarakat desa agar meningkatkan kemandirian desa dalam menutup kebutuhan yang terurai dari rantai kemiskinan (Hulu, Harahap, dan Nasution 2018).

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Melihat dari bagian kebutuhan desa yang cukup besar, maka Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana desa untuk pembangunan yang ada di desa. Penerapan dana desa secara efektif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa perlu dukungan dengan adanya sumberdaya manusia atau perangkat desa yang memumpuni dalam mengelola dana desa dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan demikian keberhasilan pertumbuhan ekonomi di desa dapat tercapai (Mingkid, Liando, dan Lengkong 2017). Kualitas sumberdaya manusia disuatu kawasan bisa diketahui dari skor IPM di suatu daerah, karena indikator IPM menggambarkan kualitas pendidikan, ke-sehatan dan kesejahteraanhidup. Dana transfer (DAU, DBH, DAK dan Pendapatan lain yang sah), PAD dan Dana Desa berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Pendapatan daerah yang paling berpengaruh terhadap IPM secara berurutan adalah Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah atau PAD dan Dana Alokasi Khusus atau DAK. Hal ini bisadilihat dari nilai elastisitas atau pengaruh total masing-masing pendapatan daerah.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh (Mamantung, ddk 2021) “Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pengelolaan APBDes di Desa Tabang Kecamatan Rainis menggunakan metode penelitian kualitatif. penelitian ini berlokasi di Desa Tabang, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian yang dilakukan oleh Maksu, Puspitasari, and Pratiwi 2020) dalam artikelnya berjudul “Demokrasi dan Kekuasaan Adat: Potensi Eksklusi Akses Dana Desa bagi Eks Pengungsi Timor-Leste”. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar keterkaitan demokrasi dengan kekuasaan adat dalam menangani eks pengungsi Timor-Leste di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, terkait dengan praktik demokrasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Rudiarta, Arthanaya, dan Suryani 2020) berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa”. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Kartika, 2012) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo”. Metode penelitiannya menggunakan deskriptif analitis kualitatif dengan informan kepala desa dan masyarakat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan ADD).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang peneliti dilakukan yaitu terletak pada lokus penelitian dan permasalahan yang dibahas didalamnya. Peneliti melakukan penelitian lebih khusus terhadap pengelolaan dana desa bidang pembinaan kemasyarakatan dengan menggunakan teori nilai-nilai demokrasi (Suacana, 2015).

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan informasi dan progres terkait pemerintahan desa dalam penguatan nilai-nilai demokrasi dalam pengelolaan dana desa bidang pelaksanaan pembangunan desa di Desa/Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan dasar-dasar alamiah agar mengulas suatu gejala yang terjadi dan dilaksanakan dengan menyertakan beragam metode yang ada dan menggunakan teori nilai-nilai demokrasi menurut (Suacana, 2015).

peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti : gambaran lokasi penelitian, kondisi situasi kerja, catatan-catatan, foto-foto dan sebagainya (Adi dan Mulyadi 2019). Adapun pengumpulan data melalui wawancara sebanyak 11 informan dan observasi selama waktu penelitian dilapangan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis nilai-nilai demokrasi dalam pengelolaan dana desa menurut Teori Suacana terbagi menjadi 8 dimensi yaitu penghargaan hak individu, etika politik, kerja sama, rotasi kekuasaan, kesetaraan, toleransi, transparan dan akuntabilitas, serta partisipasi. Namun yang menjadi perhatian khusus terdapat tiga yaitu penghargaan hak individu, etika politik dan kerja sama.

#### **3.1. Penghargaan Hak Individu**

Penghargaan terhadap hak-hak individu merupakan segala sesuatu yang tidak bisa dinggung gugat oleh orang lain baik itu bentuk barang atau jasa yang dimiliki oleh setiap orang. Penghargaan secara tertulis atau piagam penghargaan itu tidak ada namun hanya dalam bentuk hak yang diberikan. Pandangan antara individu dengan individu staf atau bawahan itu sebagai rekan kerja tim kerja dann tidak otoriter pasti semuanya dikoordinasikan lewat staf bawahan apalagi yang melaksanakan fungsi itu berada di kaur dan kasi.

#### **3.2. Etika Politik**

Etika politik merupakan kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan antar sesama rekan kerja maupun masyarakat. Dimensi dari etika politik terdiri dari tiga dimensi yaitu legitimasi hukum, legitimasi demokrasi, dan legitimasi moral.

Pada legitimasi hukum berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk sampai saat ini masyarakat belum ada yang protes mengenai Pemerintahan Desa/Negeri Batumerah, namun ada beberapa yang menjadi hambatan dalam pelayanan, seperti surat menyurat yang memerlukan tanda tangan pejabat kepala desa atau sekretaris desa yang tidak ada ditempat sehingga memerlukan waktu agar surat menyurat dapat diselesaikan. Legitimasi demokratis berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah pemberian hak suara tidak sepenuhnya diberikan kepada warga Desa/Negeri Batumerah, karena sistem pemelihan raja atau kepala desa menggunakan sistem garis keturunan. Legitimasi moral yang terjadi di Desa/Negeri Batumerah dapat berjalan dengan baik karena sistem pengambilan keputusan yang terjadi di Desa/Negeri Batumerah yang dilakukan dengan cara rapat bersama musyawarah melibatkan seluruh pemangku kepentingan, jadi

ada sekretaris negeri, saniri (BPD), kepala-kepala dati, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda pokonya melibatkan setiap pemangku kepentingan dibicarakan dan diambil keputusan bersama. Untuk respon masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Desa/Negeri Batumerah tergolong baik karena bersifat kekeluargaan sehingga tidak ada unsur penindasan atau sebalah pihak.

### **3.3. Kerja Sama**

Kerja sama adalah segala bentuk usaha yang dilakukan secara bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu tanpa melihat latar belakang orang lain. Kerja sama yang dilakukan di Desa/Negeri Batumerah dalam pengelolaan dana desa dengan sistem pengelolaannya yang pasti untuk penentuan setiap tahun adanya RKP (Rencana Kerja Pemerintah) untuk tahun selanjutnya, pasti dimulai dari usulan RT/RW kemudian usulan RT/RW disampaikan dalam musyawarah negeri dan musyawarah negeri itu dibuat dari saniri negeri atau BPD dan pada saat rapat di bentuk tim RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang nantinya turun ke lapangan seperti On The Spot dengan setiap usulan masyarakat mana yang menjadi prioritas dengan melakukan perangkan, kemudian dibuat semua prioritas kemudian akan dibahas untuk penetapan dalam MUSRENBANG kemudian disusun APBDDes yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa/Negeri dengan Saniri Negeri atau BPD untuk APBDDes yang pastinya sebelum tanggal 31 desember sudah harus ditetapkan APBDDes.

Pengelolaan dana desa yang menunjang bidang pelaksanaan pembangunan desa di Desa/Negeri Batumerah dilakukan secara demokrasi dengan melibatkan masyarakat setempat untuk turut bergabung agar tidak memicu kecemburuan jika untuk menggunakan tenaga luar sehingga berjalan dengan baik, kemudian untuk anggaran yang digunakan secara transparan dan tidak ada saling menutupi karena setiap akhir pekan Pemerintahan Desa/Negeri Batu merah selalu memaparkan setiap laporan keuang desa di depan kantor desa.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh (Maksum, Puspitasari and Pratiwi 2020) dalam artikelnya berjudul “Demokrasi dan Kekuasaan Adat: Potensi Eksklusi Akses Dana Desa bagi Eks Pengungsi Timor-Leste”. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar keterkaitan demokrasi dengan kekuasaan adat dalam menangani eks pengungsi Timor-Leste di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, terkait dengan praktik demokrasi. Lebih jelasnya, demokrasi dibatasi pada konteks potensi eksklusi akses Dana Desa bagi penduduk baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus untuk mengungkap praktik demokrasi terkait implementasi Dana Desa yang terjalin erat dengan budaya lokal. Subjek dalam penelitian ini adalah penduduk baru di Desa Fatuba'a yang secara geografis berdekatan dengan perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki peran yang signifikan dalam mendistribusikan kekuasaan baik dalam aspek pemerintahan maupun pembangunan desa, termasuk dalam penyaluran penggunaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis yaitu terletak pada lokus penelitian dan permasalahan yang dibahas didalamnya.

Sumber daya manusia yang belum memadai serta usia yang rentan menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengelolaan dana desa khususnya yang terjadi pada Desa/Negeri Batumerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pengelolaan dana desa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa di Desa/Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku serta faktor penghambat dan pendukungnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pengelolaan dana desa bidang pelaksanaan pembangunan desa di Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku belum berlangsung secara optimal

dengan menggunakan analisis dari teori (Suacana, 2015) antara lain: penghargaan hak individu, dimana masih belum ada perlakuan khusus terhadap kelompok difabel;etika politik, pelayanan surat-menyurat belum optimal;kerja sama, adanya budaya Pelagandong;rotasi kekuasaan, pemilihan kepala desa ditentukan oleh Rumah Mata Parenta;kesetaraan, memiliki prinsip persaudaraan;toleransi, adanya budaya Pelagandong;transparansi dan akuntabilitas, perangkat desa belum sepenuhnya memahami tupoksinya;serta partisipasi, kedaulatan hak suara dibatasi oleh Rumah Mata Parenta.

Penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pengelolaan dana desa bidang pelaksanaan pembangunan desa di Desa/Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Pronvinsi Maluku belum berlangsung secara optimal. Untuk mengatasi hal tersebut perlu penyamaan persepsi bagi perangkat desa agar dapat memahami peran dan tupoksinya masing-masing. Sehingga penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan dengan efektif.

#### **4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis mendapat faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu faktor usia dari masing-masing anggota yang sudah mencapai usia lanjut sehingga kadang mengalami permasalahan dalam komunikasi dengan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Kaur Keuangan “Jabatan yang kosong dulu pernah ditempati oleh perangkat desa yang sekarang menjadi staf dikarenakan usia sudah tua akhirnya harus pensiun”.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa faktor usia sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikarenakan perangkat desa dituntut untuk bisa menjalain komunikasi yang baik dan juga dapat menggali semua aspirasi dari masyarakat dikarenakan perangkat desa itu sendiri sebagai representasi dari masyarakat desa.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pengelolaan dana desa belum berjalan secara optimal karena para perangkat desa belum sepenuhnya bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing disebabkan oleh usia dan sumber daya manusia yang terbatas. Ditemukan juga ada salah satu jabatan yang masih kosong sehingga menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa. Diharapkan pemerintahan desa perlu melakukan perekrutan agar memenuhi jabatan yang masih kosong juga melakukan persamaan persepsi sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih baik lagi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu desa saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori (Suacana, 2015).

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pengelolaan dana desa terkhususnya pada bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pejabat Kepala Desa/Negeri Batumerah beserta perangkat desa lainnya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I Nyoman R, and Made Mulyadi. 2019. “Mediasi Community Based Tourism Pada Pengaruh Peran Desa Adat Terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli.” *Jurnal Media Bina Ilmiah* 14 (3).
- Amanulloh, Naeni. 2015. “Demokratisasi Desa.” *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 1–47.
- Cahyono, Heru, Nyimas Latifah Letty Aziz, Moch Nurhasim, Agus R Rahman, and R Siti Zuhro. 2020. “Pengelolaan Dana Desa: Studi Dari Sisi Demokrasi Dan Kapasitas Pemerintahan Desa.”
- Hulu, Yamulia, R Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian. 2018. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.” *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1): 146–54.
- Kartika, Ray Septianis. 2012. “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.” *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 4 (3): 179–88.
- Maksum, Ali, Wida Ayu Puspitosari, and Juwita Hayyuning Prastiwi. 2020. “Democracy and Customary Power: Potential Exclusion of Village Fund Access for East Timorese Ex-Refugees.” *Society* 8 (2): 470–85. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.154>.
- Mingkid, Gary Jonathan, Daud Liando, and Johny Lengkong. 2017. “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara).” *Jurnal Eksekutif* 2 (2).
- Nugroho, Heru. 2012. “Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1 (1).
- Rudiarta, I Ketut Gede, I Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani. 2020. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa.” *Jurnal Analogi Hukum* 2 (1): 63–67.
- Suacana, I. 2015. “Nilai-Nilai Dan Parameter Demokrasi Dalam Kehidupan Masyarakat Bali.” *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 5 (1): 81–106.
- Tiara, Dewi, Masruhim Muhammad Amir, and Sulistiarini Riski. 2016. “Keterampilan Memberikan Penguatan A.” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan* 1 (4): 5–24.

